



LAPORAN KINERJA 2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



KANTOR:

Jl. Beringin Komp. Perkantoran Kuala Tungkal 36513

Email : diskominfo@tanjabbarkab.go.id

Website : www.tanjabbarkab.go.id

Youtube : [diskominfo tanjabbarat](https://www.youtube.com/diskominfo_tanjabbarat)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023. Laporan Kinerja (LKj) ini berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1990 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun Anggaran 2023 yang menguraikan pencapaian kinerja tahunan dan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Kami menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 ini, semoga kerja sama ini dapat ditingkatkan dimasa yang akan datang.

Kuala Tungkal, 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



JOAN PRAYUDA, SE., MM

Pembina

NIP. 19810829 201001 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tugas dan Fungsi	1
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Aspek Strategis.....	4
1.5 Struktur Organisasi.....	14
1.6 Sistematika Penulisan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Rencana Strategis.....	18
2.2 Rencana Kinerja.....	22
2.3 Penetapan Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	29
3.2 Analisis Capaian Kinerja	43
3.3 Realisasi Anggaran.....	57
BAB IV Penutup	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan ANJAB	6
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Non PNS/TKK	9
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai menurut Eselon	9
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai menurut Jenjang Pendidikan	10
Tabel 1.5	Komposisi TKK menurut Jenjang Pendidikan	10
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	22
Tabel 2.1	Target Capaian Kinerja	23
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	30
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Per Indikator Utama (IKU) Tahun 2023.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Komposisi Pegawai Menurut Golongan	9
Gambar 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan (PAD) Tahun 2023	57
Gambar 3.2	Komposisi Pagu Anggaran Dinas Kominfo Tahun 2023	58
Gambar 3.3	Komposisi Serapan Anggaran Dinas Kominfo Tahun 2023	58
Gambar 3.4	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kominfo Tahun 2023	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) merupakan instrumen pertanggung-jawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam LKj ini dilaporkan berbagai hasil dari pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Semuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja (LKj), sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj disusun mengacu ke pada RENSTRA SKPD Tahun 2021-2026 dan Renja SKPD tahun 2023. LKj Dinas Kominfo mengulas mengenai laporan kinerja dinas pada tahun 2023 mulai dari rencana kerja, penetapan kinerja, sampai kepada capaian kinerja Dinas Kominfo pada tahun 2023.

1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2016 menyatakan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Kepala Daerah (Bupati) melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian, serta layanan e-government;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian, serta layanan e-government;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian, serta layanan e-government;
- d) pengelolaan administrasi dinas di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian, serta layanan e-government;
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun Anggaran 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan pada Peraturan Per-Undang-Undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);

- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 6) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis tentang Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);
- 11) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
- 12) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013– 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14);
 - 13) Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 14) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung B 17);
 - 15) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4); arat Tahun 2018 Nomor 6);
 - 16) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - 17) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021).

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Untuk melihat struktur organisasi dan fungsi yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diatur dalam peraturan bupati Nomor 51 tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai Peran Strategis meliputi:

1. Menjamin bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mampu menopang kebutuhan organisasi khususnya dalam pelaksanaan proses bisnisnya, baik secara

internal pada unsur *back office* maupun unsur *front office* sebagai unsur tambah pelayanan publik.

2. Pembentukan Citra positif Pemerintah Kabupaten serta diseminasi informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik, media internet/*cyber*, media luar ruangan, serta melalui pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.
3. Mengkoordinasikan tersusunnya data statistik dalam rangka bahan pedoman perumusan kebijakan pembangunan, baik antar perangkat daerah maupun kabupaten.
4. Mewujudkan kesadaran betapa pentingnya keamanan informasi serta bagaimana teknis pengamanan informasi beserta jaringan yang terlibat di dalamnya. Pengamanan Informasi berfokus pada 3 (tiga) hal, yaitu siapa saja yang mempunyai hak akses (*confidential*) akurasi dan konsistensi (*integrity*) dan ketersediaan informasi bila dibutuhkan (*availability*).

Sehingga baik buruknya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang *responsive* dan akuntabel dipengaruhi oleh kinerja personal dinas komunikasi dan informatika. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas yang sangat penting dalam mendukung pelayanan komunikasi dan informasi, utamanya dalam mewujudkan pelayanan berbasis teknologi informasi. Hal ini tentunya juga harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Sehingga harapan pada lima tahun yang akan datang akan berpengaruh pada kualitas pelayanan berbasis *e-government* dalam kerangka pikir SPBE dan menuju Tanjung Jabung Barat *Smart City*.

Terkait dengan lingkungan internal, terdapat beberapa aspek yang diperkirakan dapat mempengaruhi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat yakni:

1) Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 24 orang. Dengan porsi 9 orang berada di jabatan struktural, 7 orang fungsional ahli muda, 1 orang fungsional ahli pertama dan 7 orang pegawai fungsional umum.

Bila ditinjau dari Analisis Jabatan (ANJAB) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat, Pada Tahun 2023 jumlah pegawai masih sangat kurang, bahkan ada 5 posisi jabatan struktural yang disterakan masih kosong yakni Kasubbag

Keuangan, Kasi Kemitraan Media, Kasi Infrastruktur Jaringan TIK, Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kasi Pengembangan E-Government. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan dalam table berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan ANJAB

No	Nomenklatur Jabatan	Kelas Jabatan	Pegawai Tersedia	Kebutuhan Pegawai	Jumlah
1.	Kepala Dinas Kominfo	14	1	1	1
2.	Sekretaris	12	1	1	1
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1	1	1
4.	Analisis Layanan Umum	7	1	1	1
5.	Pengelola Kepegawaian	6	0	1	0
6.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0	1	0
7.	Pranata Kearsipan	6	0	1	0
8.	Pengadministrasi Umum	5	1	1	1
9.	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1	1	1
10.	Pengemudi	3	0	1	0
11.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	0	1	0
12.	Bendahara	7	1	1	1
13.	Verikator Keuangan	6	0	2	0
14.	Pengadministrasi Keuangan	5	2	2	2
15.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program	9	1	1	1
16.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	0	1	0
17.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	7	0	1	0
18.	Pengadministrasi Perencanaan Program	5	0	1	0
19.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Opini Publik	11	1	1	1
20.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	8	1	1	1
21.	Analisis Data dan Informasi	7	0	1	0
22.	Pengelola Data	5	0	1	0
23.	Penyusun Bahan Informasi	5	0	1	0
24.	Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik	8	1	1	1
25.	Analisis Berita	7	0	1	0

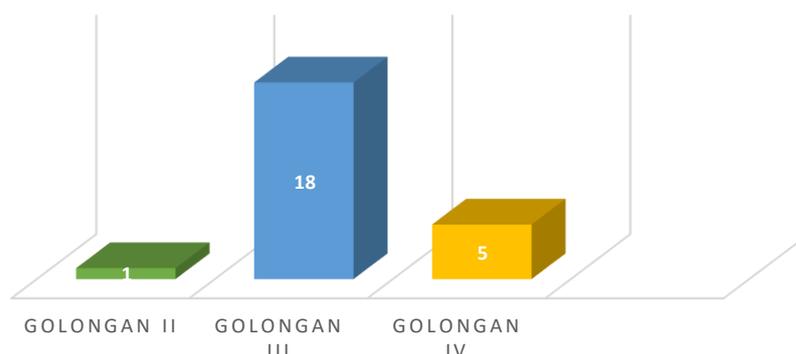
26.	Penyusun Berita dan Pendapat Umum	7	0	1	0
27.	Analisis Konten Media Sosial	7	0	1	0
28.	Kepala Seksi Media Publik dan Penyiaran	8	1	1	1
29.	Analisis Berita	7	0	1	0
30.	Analisis Dokumen Perizinan	7	0	1	0
31.	Analisis Konten Media Sosial	7	0	1	0
32.	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	11	1	1	1
33.	Kepala Seksi Layanan Komunikasi Publik	8	1	1	1
34.	Analisis Peraturan Administrasi	7	0	1	0
35.	Penyusun Berita dan Pendapat Umum	7	0	1	0
36.	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	6	0	1	0
37.	Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik	8	0	1	0
38.	Penyusun Dokumentasi Kesenian dan Perfilman	7	0	1	0
39.	Pengadministrasian Analisis dan Kemitraan Media	5	0	1	0
40.	Pengadministrasian Keuangan	5	0	1	0
41.	Kepala Seksi Diseminasi Informasi	8	1	1	1
42.	Perancang Grafis	7	0	1	0
43.	Penyusun Rencana Kemitraan Usaha Besar	7	0	1	0
44.	Tenaga Peliputan	6	0	5	0
45.	Kepala Bidang TIK dan Persandian	11	1	1	1
46.	Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur Jaringan	8	0	1	0
47.	Pengelola Teknologi Informasi	6	0	1	0
48.	Pengelola Sistem dan Jaringan	6	0	1	0
49.	Pengendali Jaringan Komunikasi	7	0	1	0
50.	Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi	8	1	1	1
51.	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	7	0	1	0
52.	Analisis Sistem Informasi	7	0	1	0
53.	Pengelola Data	6	0	1	0

54.	Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Sandi Telekomunikasi	8	1	1	1
55.	Analisis Persandian	7	0	1	0
56.	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	6	0	1	0
57.	Operator Sandi dan Telekomunikasi	6	0	1	0
58.	Kepala Bidang Layanan E-Government	11	1	1	1
59.	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi	8	0	1	0
60.	Pranata Komputer Pertama	8	1	1	1
61.	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	7	0	1	0
62.	Pengolah data Penyuluhan dan layanan Informasi	6	0	1	0
63.	Pengelola Database	6	0	1	0
64.	Pengadministrasian Umum	5	0	1	0
65.	Kepala Seksi Pengembangan E-Government	8	0	1	0
66.	Pengelola Situs Web	6	1	1	1
67.	Pengelola Data	6	0	1	0
68.	Pengadministrasian Umum	5	0	1	0
69.	Teknisi Produksi Multimedia dan Web	5	0	1	0
70.	Kepala Seksi Tata Kelola E-Government	8	1	1	1
71.	Analisis data Standarisasi/Penyedia	7	0	1	0
72.	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	6	0	1	0
73.	Koordinator Sistem Informasi Distribusi	7	0	1	0
	JUMLAH		24	79	24

Sumber: Dinas Kominfo Tahun 2023

Berdasarkan golongan kepegawaian, perincian jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 adalah:

Gambar 1.1
Komposisi Pegawai Menurut Golongan



Untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga administrasi maupun tenaga teknis dan lapangan Dinas Komunikasi dan Informatika mempekerjakan pegawai Non PNS yang biasa disebut tenaga kerja kontrak (TKK) dengan jumlah sebanyak 35 orang. Untuk lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Non PNS

NO.	STAF MENURUT BIDANG	JUMLAH
1.	Sekretariat	9
2.	Bidang Pengelolaan Informasi dan Opini Publik	8
3.	Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	8
4.	Bidang TIK dan Keamanan Informasi	6
5.	Bidang Layanan E-Government	4
	JUMLAH	35

Berdasarkan Eselon rincian jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Menurut Eselon

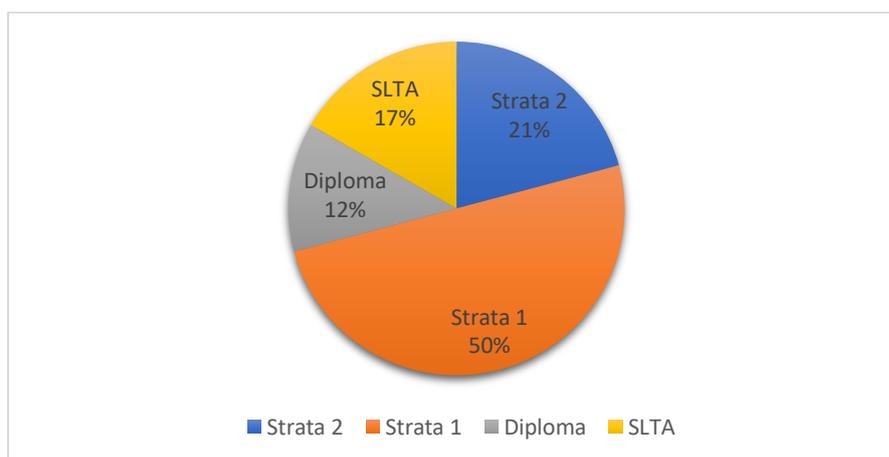
No.	Jabatan	Eselon	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
1.	Kepala Dinas	IIb	1	1	-
2.	Sekretaris	IIIa	1	1	-
3.	Kepala Bidang	IIIb	4	4	-
4.	Kasubbag / Kasi	IVa	15	10	5
5.	Staf Pelaksana	-	43	8	36
	JUMLAH	35	64	24	41

Berdasarkan latar belakang pendidikan rincian jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1.	Strata Dua (S2)	5	
2.	Strata Satu (S1)	12	
3.	Diploma	3	
4.	SMA / SMK	4	
	JUMLAH	24	

Gambar 1.2
Persentase Latar Belakang Pendidikan Pegawai

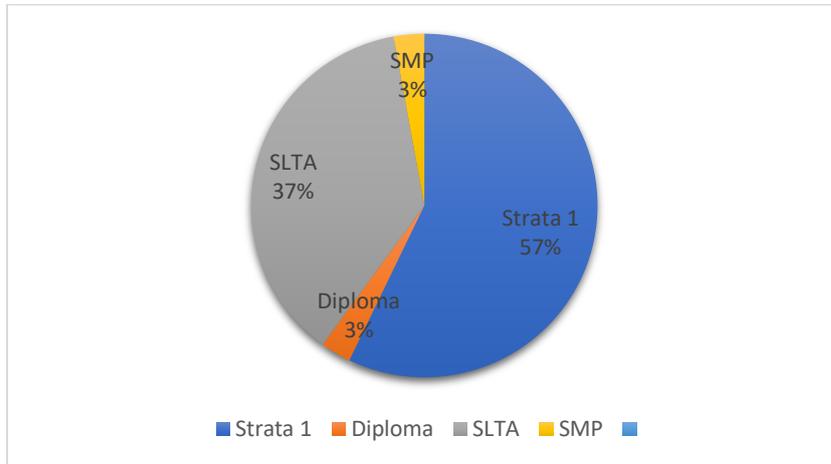


Berdasarkan latar belakang pendidikan rincian jumlah TKK/ pegawai Non PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Komposisi Pegawai Non PNS Menurut Jenjang Pendidikan

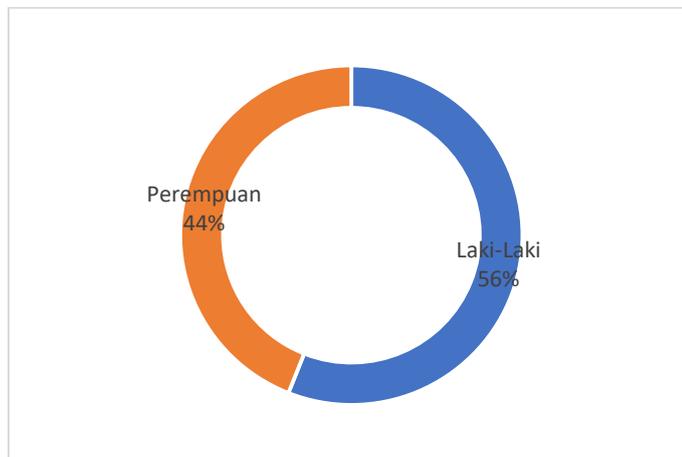
NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1.	Strata Satu (S1)	20	
2.	Diploma	1	
3.	SMA / SMK	13	
4.	SMP	1	
	JUMLAH	35	

Gambar 1.3
Persentase Latar Belakang Pendidikan Pegawai Non PNS



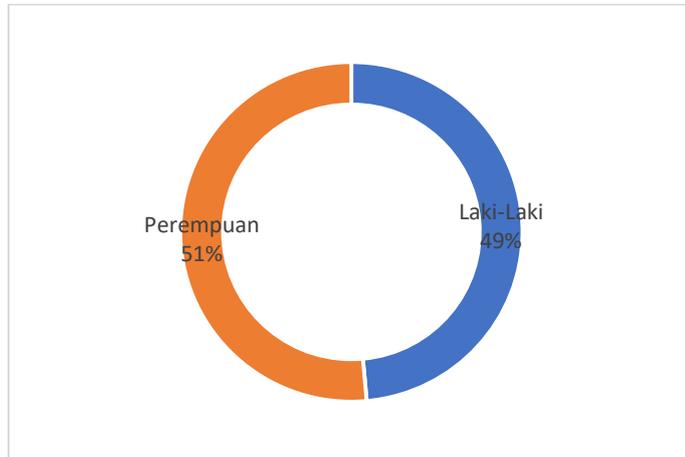
Berdasarkan jenis kelamin rincian jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.4
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin



Berdasarkan jenis kelamin rincian jumlah pegawai Non PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.5
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin



2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada saat ini digunakan seoptimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan operasional kegiatan. Adapun keadaan sarana dan prasarana yang ada saat ini berupa:

a. Infrastruktur Dasar Pelayanan Publik

NO	NAMA PERALATAN	OPERASIONAL
1.	1 (Satu) Unit Server dan Kelengkapannya	Yang diperuntukan Server
2.	Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 Paket Aplikasi SPSE dan ULP b. Paket Aplikasi PNS Mail c. Domain tanjabbarkab.go.id d. Aplikasi website dan Sub Domain Website Seluruh Perangkat Daerah dalam Kab. Tanjab Barat
3.	Bandwidth	<ul style="list-style-type: none"> a. Sewa Bandwidth yang berguna untuk akses internet/Intranet ke seluruh OPD lingkup Kab. Tanjung Jabung Barat b. Wifi Akses Internet c. Terkoneksinya jaringan internet / intranet melalui fiber optic dan Radio Link

		<p>d. Akses Internet gratis yang menggunakan Bandwidth.</p> <p>e. Akses internet gratis melalui Wifi (Hotspot Area) Yang dipasang di beberapa OPD</p>
--	--	---

b. Sarana dan Prasarana Penunjang

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	KET
1.	Mobil Mini Bus	4	3 Baik 1 Kurang Baik	
2.	Sepeda Motor	16	Baik	
3.	Meja Kerja	12	Baik	
4.	Meja Rapat	2	Baik	
5.	Genset	1	Baik	
6.	Mesin Ketik Manual	3	2 Baik 1 Kurang Baik	
7.	Mesin Foto Copy	1	Kurang Baik	
8.	Filling Besi/Metal	3	2 Baik 1 Kurang Baik	
9.	Lemari Kaca	1	Baik	
10.	Mesin Penghisap Asap	7	Baik	
11.	Lemari Kayu	5	3 Baik 2 Kurang Baik	
12.	Kursi Besi/Metal	6	Baik	
13.	Meja Panjang	1	Baik	
14.	Kursi Tamu	1	Kurang Baik	
15.	Kursi Lipat	6	Baik	
16.	Kursi Besi	8	Baik	
17.	Kursi ½ Biro	31	26 Baik 5 Kurang Baik	
18.	Sofa	2	Baik	
19.	Kursi Plastik	5	Kurang Baik	
20.	Laptop	12	3 Rusak Ringan	
21.	Lemari ES	1	Baik	
22.	AC	10	9 Baik 1 Kurang Baik	
23.	Kipas Angin	2	Baik	
24.	Radio	30	17 Baik 13 Kurang Baik	
25.	Televisi	1	Berat	
26.	Unit Power Supply	6	4 Baik 2 Kurang Baik	
27.	Stabilisator	1	Baik	
28.	Dispencer	4	3 Baik 1 Kurang Baik	
29.	Kamera	3	Baik	
30.	Bel Listrik	1	Baik	
31.	PC (Personal Computer)	5	Baik	
32.	Lap Top	9	Baik	
33.	Note Book	5	Baik	
34.	Hard Disk	2	Baik	
35.	Printer	6	Baik	

3) Sumber Dana

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan DPA pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Penjabaran APBD tahun 2023. Peraturan tersebut mengalami perubahan sesuai anggaran perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nomor: 26 tahun 2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan kegiatan dengan anggaran Murni sebesar Rp. 9.149.026.649,00 dan melalui mekanisme perubahan APBD tertanggal 11 Oktober 2023 menjadi Rp. 9.850.902.556,00 dengan rincian Belanja Operasi Rp. 9.780.209.556,00 dan Belanja Modal Rp. 70.693.000,00.

1.5 Struktur Organisasi

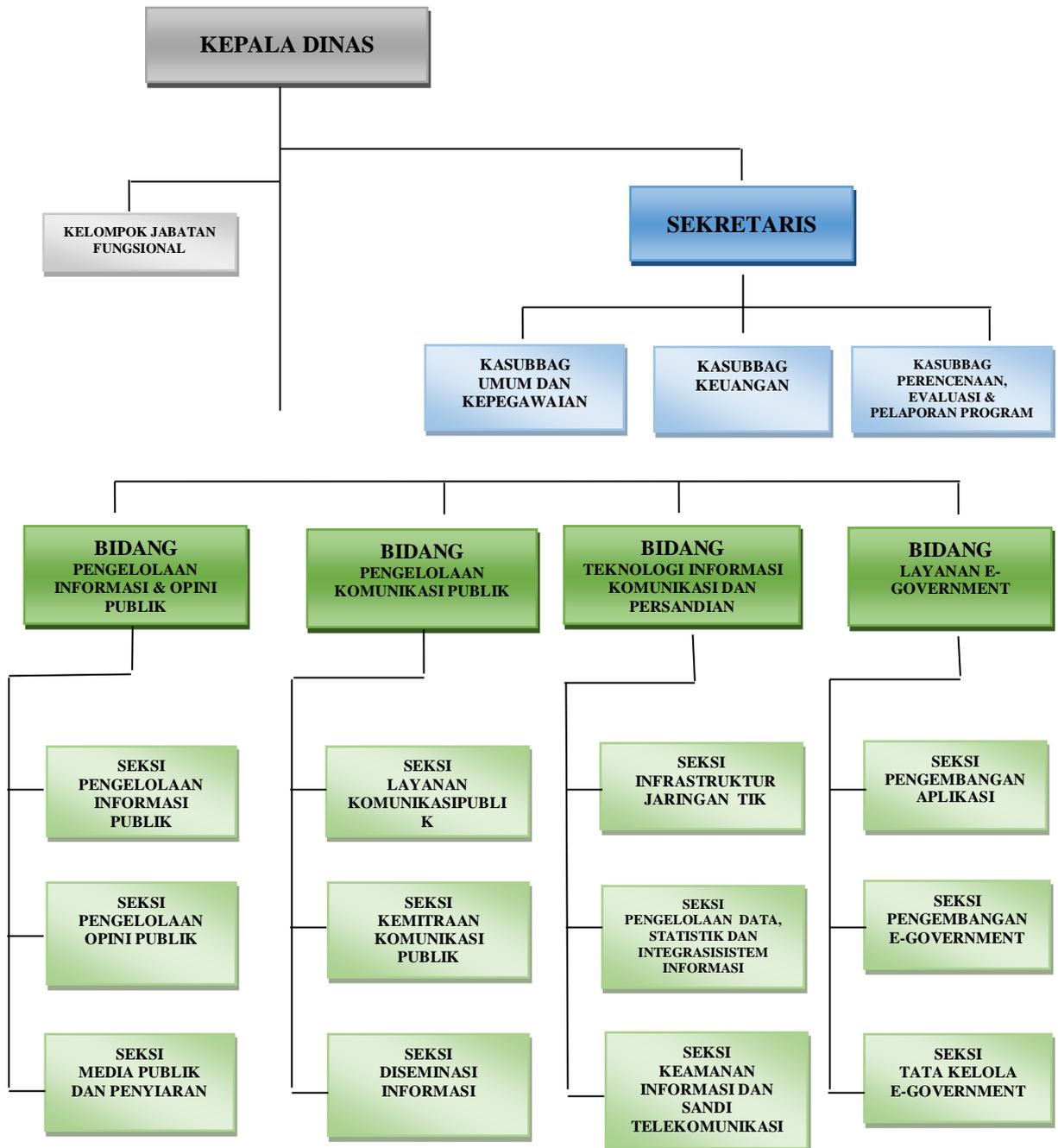
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.

- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Opini Publik, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 - 2) Seksi Pengelolaan Opini Publik; dan
 - 3) Seksi Media Publik dan Penyiaran
- d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, terdiri dari:
 - 1) Seksi Layanan Komunikasi Publik;
 - 2) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik; dan
 - 3) Seksi Desiminasi Komunikasi
- e. Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian, terdiri dari:
 - 1) Seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 2) Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi;
 - 3) Seksi Keamanan Informasi dan Sandi Telekomunikasi;
- f. Bidang Layanan E-Government, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - 2) Seksi Pengembangan E-Government; dan
 - 3) Seksi Tata Kelola E-Government.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.6
Struktur Organisasi Dinas Kominfo



1.6 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN , menjelaskan singkat mengenai Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Landasan Hukum, Aspek Strategis, Struktur Organisasi dan Sistematika Penulisan
BAB II	PERENCANAAN KINERJA , menjelaskan Rencana Strategis (mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja), Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA , Menjelaskan mengenai capaian kinerja dan serapan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 dengan perbandingan capaian pada tahun ini dengan satu tahun kebelakang.
BAB IV	PENUTUP , berisikan kesimpulan dari seluruh isi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan. Perencanaan pengelolaan diawali dengan penyusunan RENSTRA.

2.1. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya. Dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat merupakan manifestasi komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2021 – 2026.

RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah penjabaran dari RPJMD yang memfokuskan bidang kerjanya kepada tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, dan strategi untuk menyelenggarakan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergi, harmonis dan berkesinambungan. Selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Daerah memuat rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala Daerah/ Wakil Daerah. Adapun Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sebagai berikut:

1. Visi

“MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

Penjabaran dari Visi diatas adalah sebagai berikut:

1) BERKUALITAS

Yakni Sumber daya manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi daerah;

2) EKONOMI MAJU

Yakni meningkat dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;

3) RELIGIUS

Yakni berlandaskan nilai-nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur dan tatanan kehidupan bagi masyarakat;

4) KOMPETITIF

Yakni mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumber daya unggulan daerah;

5) AMAN

Yakni suasana aman dan tertib sehingga masyarakatnya dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari – hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi;

6) HARMONIS

Yakni terjalin kerukunan tarumat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga dan pemerintah pusat

2. Misi

Adapun Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak; Sumber daya manusia dianggap sebagai modal utama pembangunan daerah, perlu dibekali dengan iman, ilmu, dan berahlak, agar mampu menjadi manusia yang berdaya saing, sehat dan berahlak sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sejahtera dan berkah;
- 2) Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis; Dengan kondisi sosial yang tentram, tertib dan harmonis menjadikan rasa nyaman pada masyarakat untuk berkeaktivitas, dan kondusif bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu kondisi harmonis tidak hanya sebatas antar umat beragama, kelompok, dan lapisan masyarakat tapi juga terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga dan pemerintah pusat;
- 3) Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; Menyelenggarakan roda pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan efektif, efisien, dan akutanbel agar menghasilkan pelayanan publik yang prima, kerja pemerintah yang berorientasi kinerja, dan peningkatan pendapatan asli daerah;
- 4) Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;

Seiring perkembangan daerah dan pertumbuhan penduduk, tentunya harus diikuti dengan peningkatan aktivitas perekonomian. Pengembangan cakupan aktivitas ekonomi lebih luas lagi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta pengangguran. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai upaya skala mikro yang sejalan dengan upaya peningkatan aktivitas perekonomian;

5) **Pemerataan Pembangunan Daerah dari Desa Sampai ke Kota;**

Pembangunan infrastruktur dan penguatan akses bagi seluruh desa dan kota, terutama bagi desa yang tertinggal, ditujukan agar desa – desa dan kota dapat tumbuh berkembang secara bersamaan dan seimbang.

Mengacu pada uraian Visi dan Misi di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 3 (tiga) urusan yaitu Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Ketiga urusan tersebut mendukung MISI III.

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator

- Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan harus disusun dengan baik guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu Tujuan 3.1: Terselenggaranya tata Kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan OPD sebagai berikut: Meningkatkan Tata kelola Pemerintah Berbasis Elektronik.

- Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan. Sasaran yang ditetapkan harus terukur, untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dengan angka atau persentase yang terukur.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD yaitu SASARAN 3.1.1. Meningkatnya akutanbilitas kinerja pemerintah. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran strategis OPD sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP).
- 2) Terlaksananya Layanan Pemerintah Secara Digital
- 3) Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Data Statistik
- 4) Meningkatnya Keamanan Informasi Berbasis Elektronik

Adapun sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dapat dilihat melalui gambar sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)	Cakupan Masyarakat yang Tepakar Informasi Terkait Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah
2.	Terlaksananya Layanan Pemerintah Secara Digital	Persentase OPD yang Memanfaatkan Layanan Data Centre dalam Pelaksanaan Layanan Berbasis Elektronik
3.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Data Statistik	Persentase Metadata Statistik Sektoral yang Terpublikasi
4.	Meningkatnya Keamanan Informasi Berbasis Elektronik	Persentase Sistem Informasi yang Terproteksi Sistem Keamanan Informasi

2.2. Rencana Kinerja

Target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan indikator dan target capaiannya dapat dilihat secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Target Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)	Tersedianya Layanan Informasi, Telekomunikasi dan Opini Publik	Media	4	88,95%
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyiaran	Berita dan Lembaga	500 Berita dan 4 Lembaga	94,82%
		Ketersediaan Informasi dan meningkatnya layanan informasi publik	DIP	1	97,64%
		Terselenggaranya Layanan Hubungan Media	TV, Media	1 TV Nasional, 3 Media TV, 15 Media Harian, 20 Media Mingguan dan 80 Media Online	99,96%
		Terwujudnya Fasilitasi Kemitraan Layanan Komunikasi Publik Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan	Berita	500 Berita	99,96%

		Pemerintah Kab. Tanjab Barat			
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	KIM	3 KIM	92,90%
2.	Terlaksananya Layanan Pemerintah Secara Digital	Tercapainya jumlah OPD yang menggunakan jaringan komunikasi data dan <i>share bandwidth</i>	OPD dan Menara	44 OPD dan 126 Menara	99,98%
		Tersedianya dukungan layanan penggunaan Aplikasi Sistem Pemerintahan Informasi Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanjab Barat	Aplikasi	12 Aplikasi	99,98%
		Tersedianya jumlah sub domain Layanan Informasi Portal Induk Pemerintah Kab. Tanjab Barat	OPD	44 OPD	99,88%
		Tersedianya Portal Perangkat Daerah yang handal dan mutakhir	OPD	44 OPD	99,88%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Data Statistik	Jumlah OPD yang menyampaikan data melalui aplikasi Satu Data	OPD	44 OPD	99,37%
4.	Meningkatnya Keamanan Informasi Berbasis Elektronik	Tercapainya jumlah surat email sanapati	%	100%	99,47%

Sumber: Dinas Kominfo 2023

2.3. Penetapan Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan perjanjian antara bawahan ke atasan guna mencapai target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup hasil dari kegiatan sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dari penyusunan kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima Amanah
5. Sebagai dasar dalam menetapkan sasaran kinerja pegawai

Adapun Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dengan Bupati, sebagai dokumen yang digunakan untuk implementasi pencapaian kinerja sasaran strategis dalam setahun dengan target indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai. Secara rinci Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari sasaran strategis diatas beserta target dan program sebagai implementasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Target dan Program

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1.	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	100 %	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2.	Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Perangkat Daerah	100 %	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

3.	Meningkatnya OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic dalam Menyusun pembangunan daerah	100 %	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4.	Meningkatnya pengamanan sistem elektronik & informasi	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Tingkat II	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri 1 (satu) urusan kesekretariatan dan 4 (empat) bidang yaitu Pengelolaan Informasi dan Opini Publik, Pengelolaan Komunikasi Publik, Layanan *E-Government* dan Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian. Program-program tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan yang merupakan sekumpulan tindakan yang dilakukan dalam upaya tercapainya tujuan yang sudah direncanakan dalam rencana strategis. Rincian program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan yang mendukung program ini adalah:

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bungalow Lainnya.
- 2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- Kegiatan yang mendukung program ini adalah:
- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Layanan Hubungan Media
 - Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- 3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- Kegiatan yang mendukung program ini adalah:

- Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - Pengelolaan e-government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
- 4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- Kegiatan yang mendukung program ini adalah:
- Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- 5) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- Kegiatan yang mendukung program ini adalah:
- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian ini akan diulas dan dianalisa hasil capaian kinerja atau lebih umum disebut Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat. Penilaian LKj ini merupakan pengukuran rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah dilaksanakan dalam tahun berjalan, mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau Renja, dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika, dimana LKj merupakan laporan yang menampilkan data beserta analisisnya dari hasil pencapaian kinerja seluruh kegiatan yang telah diprogram dan direncanakan dalam kurun satu tahun.

LKj menjadi suatu bentuk pertanggung-jawaban dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, yang ditinjau dari hasil pelaksanaan program kegiatan yang berpedoman pada penetapan target Indikator Kinerja Sasaran, termasuk keterkaitan dengan penyerapan anggaran dan *Impact* atau dampak yang dapat dirasakan oleh

masyarakat. Faktor-faktor yang diukur adalah merupakan elemen dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, yaitu target, realisasi, capaian dan keluaran. Perbandingan antar obyek pengukuran akan menghasilkan suatu nilai prosentase, dimana nilai tersebut akan digunakan sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan kinerja suatu dinas. Nilai persentase yang memiliki pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun menjadi indikator keberhasilan dari program kerja jangka menengah suatu SKPD.

Semua kegiatan Dinas Kominfo mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan. Dari Visi dan Misi ini kemudian diterjemahkan ke dalam Tujuan dan Sasaran. Berpedoman pada Visi Misi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat mendukung MISI III. Terkait misi tersebut konsekuensinya adalah kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus mampu mendukung program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Seberapa besar kontribusi yang mampu diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pengukuran kinerja yang dilaporkan dalam format LKj ini. Dalam LKj pengukuran dilakukan pada capaian target atau realisasi dari Kinerja Sasaran.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, Permendagri No. 86 Tahun 2017 memberikan acuan skala pengukuran dalam 5 (lima) katagori, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 76	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Berdasarkan skala nilai peringkat kerja diatas, dapat dijelaskan progres capaian kinerja tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

Pada Evaluasi RENJA triwulan I (satu) rata – rata capaian kinerja sebesar 10,98% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “**SANGAT RENDAH**”, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, dengan rata – rata capaian kinerja 12,17% kriteria penilaian realisasi kinerja “Sangat Rendah”, didukung 1 kegiatan yaitu:

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja 12,17%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, dengan tingkat capaian kinerja 15,20%
 - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan tingkat capaian kinerja 24,73%
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan tingkat capaian kinerja 11,79%
 - Pelayanan Informasi Publik dengan tingkat capaian kinerja 23,94%
 - Layanan Hubungan Media dengan tingkat capaian kinerja 10,64%
 - Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan dengan tingkat capaian kinerja 15,70%
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan tingkat capaian kinerja 11,18%

2. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA, dengan rata – rata capaian kinerja 2,88% kriteria penilaian realisasi kinerja “Sangat Rendah”, didukung 2 kegiatan yaitu:

- Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan tingkat capaian kinerja 1,46%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah dengan tingkat capaian kinerja 1,46%
- Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan tingkat capaian kinerja 12,44%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan tingkat capaian kinerja 18,17%

- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan tingkat capaian kinerja 1,97%
 - Pengelolaan e-Government Chief Information Officer (GCIO) dengan tingkat capaian kinerja 11,33%
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL, dengan rata – rata capaian kinerja 19,27% kriteria penilaian realisasi kinerja “Sangat Rendah”, didukung 1 kegiatan yaitu:
- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja 19,27%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan tingkat capaian kinerja 19,27%
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI, dengan rata – rata capaian kinerja 19,33% kriteria penilaian realisasi kinerja “Sangat Rendah”, didukung 1 kegiatan yaitu:
- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja 19,33%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian kinerja 19,33%
5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KABUPATEN/KOTA, dengan rata – rata capaian kinerja 13,58% kriteria penilaian realisasi kinerja “Sangat Rendah”, didukung 7 kegiatan yaitu:
- Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja 23,86%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan tingkat capaian kinerja 23,96%
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja 23,68%
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja 11,55%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan tingkat capaian kinerja 10,74%

- Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN dengan tingkat capaian kinerja 25,73%
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan tingkat capaian kinerja 20,68%
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja 0,00%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan tingkat capaian kinerja 0,00%
- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja 16,48%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan tingkat capaian kinerja 23,51%
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan tingkat capaian kinerja 26,77%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan tingkat capaian kinerja 25,67%
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan tingkat capaian kinerja 0,00%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan tingkat capaian kinerja 0,00%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan tingkat capaian kinerja 15,94%
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan tingkat capaian kinerja 26,45%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan tingkat capaian kinerja 13,33%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan tingkat capaian kinerja 28,94%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan tingkat capaian kinerja 22,95%
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan tingkat capaian kinerja 32,46%, didukung sub kegiatan yaitu:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan tingkat capaian kinerja 43,00%
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan tingkat capaian kinerja 0,00%
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan tingkat capaian kinerja 25,00%

Pada Evaluasi RENJA triwulan II rata-rata capaian kinerja meningkat sebesar 31,87%, dari 10,98% menjadi 42,85% kriteria penilaian realisasi kinerja **“SANGAT RENDAH”**. Adapun program yang mengalami peningkatan sebagai berikut:

1. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, dengan rata – rata capaian kinerja 48,85% kriteria penilaian realisasi kinerja “Sangat Rendah”, didukung 1 kegiatan yaitu:
 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja 48,85%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, dengan tingkat capaian kinerja 30,41%
 - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan tingkat capaian kinerja 49,45%
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan tingkat capaian kinerja 23,57%
 - Pelayanan Informasi Publik dengan tingkat capaian kinerja 47,88%
 - Layanan Hubungan Media dengan tingkat capaian kinerja 48,91%
 - Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan dengan tingkat capaian kinerja 61,44%
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan tingkat capaian kinerja 22,36%
2. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA, dengan rata – rata capaian kinerja 26,19% kriteria penilaian realisasi kinerja “Sangat Rendah”, didukung 2 kegiatan yaitu:

- Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan tingkat capaian kinerja 26,42%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah dengan tingkat capaian kinerja 26,42%
 - Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan tingkat capaian kinerja 27,33%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan tingkat capaian kinerja 36,35%
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan tingkat capaian kinerja 12,01%
 - Pengelolaan e-Government Chief Information Officer (GCIO) dengan tingkat capaian kinerja 22,66%
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL, dengan rata – rata capaian kinerja 38,54% kriteria penilaian realisasi kinerja “Sangat Rendah”, didukung 1 kegiatan yaitu:
- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja 38,54%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan tingkat capaian kinerja 38,54%
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI, dengan rata – rata capaian kinerja 38,65% kriteria penilaian realisasi kinerja “Sangat Rendah”, didukung 1 kegiatan yaitu:
- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja 38,65%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian kinerja 38,65%
5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KABUPATEN/KOTA, dengan rata – rata capaian kinerja 46,74% kriteria penilaian realisasi kinerja “Sangat Rendah”, didukung 7 kegiatan yaitu:

- Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja 51,39%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan tingkat capaian kinerja 55,26%
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja 44,12%
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja 44,53%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan tingkat capaian kinerja 44,23%
 - Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN dengan tingkat capaian kinerja 51,61%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan tingkat capaian kinerja 41,32%
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja 100,00%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan tingkat capaian kinerja 100,00%
- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja 54,29%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan tingkat capaian kinerja 47,02%
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan tingkat capaian kinerja 52,88%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan tingkat capaian kinerja 51,22%
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan tingkat capaian kinerja 16,02%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan tingkat capaian kinerja 56,66%
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan tingkat capaian kinerja 54,87%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan tingkat capaian kinerja 39,65%

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan tingkat capaian kinerja 58,03%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan tingkat capaian kinerja 50,35%
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan tingkat capaian kinerja 53,24%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan tingkat capaian kinerja 58,95%
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan tingkat capaian kinerja 34,86%
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan tingkat capaian kinerja 50,00%

Adapun Evaluasi RENJA triwulan III rata-rata capaian kinerja sebesar 68,10% dengan kriteria penilaian "**SEDANG**" naik sebesar 25,25% dari triwulan II sebesar 42,85%, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, dengan rata – rata capaian kinerja 89,08% kriteria penilaian realisasi kinerja "**Tinggi**", didukung 1 kegiatan yaitu:
 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja 89,08%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, dengan tingkat capaian kinerja 45,61%
 - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan tingkat capaian kinerja 74,18%
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan tingkat capaian kinerja 54,80%
 - Pelayanan Informasi Publik dengan tingkat capaian kinerja 71,82%
 - Layanan Hubungan Media dengan tingkat capaian kinerja 91,22%

- Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan dengan tingkat capaian kinerja 97,58%
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan tingkat capaian kinerja 81,72%
2. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA, dengan rata – rata capaian kinerja 51,95% kriteria penilaian realisasi kinerja “Rendah”, didukung 2 kegiatan yaitu:
- Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan tingkat capaian kinerja 50,94%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah dengan tingkat capaian kinerja 50,94%
 - Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan tingkat capaian kinerja 59,01%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan tingkat capaian kinerja 54,52%
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan tingkat capaian kinerja 68,47%
 - Pengelolaan e-Government Chief Information Officer (GCIO) dengan tingkat capaian kinerja 47,67%
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL, dengan rata – rata capaian kinerja 57,81% kriteria penilaian realisasi kinerja “Rendah”, didukung 1 kegiatan yaitu:
- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja 57,81%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan tingkat capaian kinerja 57,81%
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI, dengan rata – rata capaian kinerja 57,98% kriteria penilaian realisasi kinerja “Rendah”, didukung 1 kegiatan yaitu:

- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja 57,98%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian kinerja 57,98%
5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KABUPATEN/KOTA, dengan rata – rata capaian kinerja 64,19% kriteria penilaian realisasi kinerja “Rendah”, didukung 7 kegiatan yaitu:
- Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja 69,09%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan tingkat capaian kinerja 70,64%
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja 66,18%
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja 61,40%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan tingkat capaian kinerja 60,71%
 - Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN dengan tingkat capaian kinerja 75,57%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan tingkat capaian kinerja 61,60%
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja 100,00%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan tingkat capaian kinerja 100,00%
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja 72,22%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan tingkat capaian kinerja 47,02%
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan tingkat capaian kinerja 60,37%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan tingkat capaian kinerja 76,78%

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan tingkat capaian kinerja 16,02%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan tingkat capaian kinerja 76,23%
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan tingkat capaian kinerja 82,41%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan tingkat capaian kinerja 57,19%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan tingkat capaian kinerja 90,17%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan tingkat capaian kinerja 70,44%
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan tingkat capaian kinerja 76,56%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan tingkat capaian kinerja 76,43%
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan tingkat capaian kinerja 78,66%
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan tingkat capaian kinerja 75,00%

Berdasarkan evaluasi triwulan IV rata-rata capaian kinerja sebesar 97,59% dengan kriteria penilaian "**SANGAT TINGGI**" naik sebesar 29,49% dari triwulan III sebesar 68,10%, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, dengan rata-rata capaian kinerja 99,59% kriteria penilaian realisasi kinerja "**Sangat Tinggi**", didukung 1 kegiatan yaitu:
 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja 99,59%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, dengan tingkat capaian kinerja 88,95%

- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan tingkat capaian kinerja 100,00%
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan tingkat capaian kinerja 94,82%
 - Pelayanan Informasi Publik dengan tingkat capaian kinerja 97,64%
 - Layanan Hubungan Media dengan tingkat capaian kinerja 99,96%
 - Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan dengan tingkat capaian kinerja 99,96%
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan tingkat capaian kinerja 92,90%
2. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA, dengan rata–rata capaian kinerja 99,98% kriteria penilaian realisasi kinerja **“Sangat Tinggi”**, didukung 2 kegiatan yaitu:
- Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan tingkat capaian kinerja 99,98%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah dengan tingkat capaian kinerja 99,98%
 - Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan tingkat capaian kinerja 99,98%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan tingkat capaian kinerja 99,98%
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan tingkat capaian kinerja 99,88%
 - Pengelolaan e-Government Chief Information Officer (GCIO) dengan tingkat capaian kinerja 99,88%
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL, dengan rata – rata capaian kinerja 99,37% kriteria penilaian realisasi kinerja **“Sangat Tinggi”**, didukung 1 kegiatan yaitu:
- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja 99,37%, didukung sub kegiatan yaitu:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan tingkat capaian kinerja 99,37%
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI, dengan rata – rata capaian kinerja 99,47% kriteria penilaian realisasi kinerja **“Sangat Tinggi”**, didukung 1 kegiatan yaitu:
- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja 99,47%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian kinerja 99,47%
5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KABUPATEN/KOTA, dengan rata–rata capaian kinerja 95,15% kriteria penilaian realisasi kinerja **“Sangat Tinggi”**, didukung 7 kegiatan yaitu:
- Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja 99,96%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan tingkat capaian kinerja 99,94%
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja 100,00%
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja 93,65%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan tingkat capaian kinerja 93,31%
 - Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN dengan tingkat capaian kinerja 100,00%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan tingkat capaian kinerja 93,86%
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja 100,00%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan tingkat capaian kinerja 100,00%
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja 99,63%, didukung sub kegiatan yaitu:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan tingkat capaian kinerja 100,00%
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan tingkat capaian kinerja 100,00%
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan tingkat capaian kinerja 99,94%
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan tingkat capaian kinerja 100,00%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan tingkat capaian kinerja 99,91%
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan tingkat capaian kinerja 97,99%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan tingkat capaian kinerja 99,30%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan tingkat capaian kinerja 97,05%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan tingkat capaian kinerja 100,00%
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan tingkat capaian kinerja 99,67%, didukung sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan tingkat capaian kinerja 99,56%
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan tingkat capaian kinerja 99,95%
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan tingkat capaian kinerja 99,87%

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Setelah diperoleh data hasil pengukuran kinerja maka dilakukan pengukuran tingkat pencapaian sasaran. Pengukuran ini dilakukan dengan metode perbandingan antara neraca tingkat capaian (target) dengan realisasi capaian dari setiap kegiatan.

Untuk mencapai sasaran hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada lampiran Tabel pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Ditinjau dari capaian kinerja masing masing sasaran untuk Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dapat melaksanakan tugas utamanya yang menjadi tanggung jawab organisasi, berikut uraian pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, dilihat dari masing–masing sasaran stategis yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja (*performance results*) untuk masing masing sasaran dan indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sasaran 1 “Peningkatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah”**

Keberhasilan sasaran, target dan realisasinya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%

2. **Sasaran 2 “Peningkatan Pelayanan Administrai Perkantoran, Laporan Keuangan dan Kinerja Aparatur”**

Keberhasilan sasaran, target dan realisasinya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Jumlah ASN yang dibayarkan gaji/tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	93,31%
2.	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	20 Orang	20 Orang	100,00%
3.	Tersedianya laporan capaian kinerja program dan kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	93,86%
4.	Tersedianya jumlah pengadaan pakaian dinas harian dan perlengkapannya	60 Stel	60 Stel	100,00%
5.	Terbayarnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
6.	Tersedianya Alat Tulis Kantor yang memadai	50 Jenis	50 Jenis	100,00%
7.	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	99,94%
8.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
9.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan-peraturan	6 Koran	6 Koran	70,00%
10.	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	99,91%
11.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	1 Unit	99,96%
12.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	99,30%
13.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	97,05%
14.	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan dan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
15.	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	19 Unit	19 Unit	99,56%
16.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22 Unit	22 Unit	99,95%
17.	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	99,87%

Dari pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing indikator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata pencapaian hampir 100%. Capaian tersebut direalisasikan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Penyediaan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 4) Pengadaan pakaian dinas harian dan perlengkapannya

- 5) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 6) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 7) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 8) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-peraturan
- 10) Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 11) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 12) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 13) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 14) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Jasa Kebersihan Kantor
- 15) Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 16) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 17) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pelaksanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil (*outcome*) sebagai berikut:

- Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
- Tersedianya Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Tersedianya Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Tersedianya Bahan Logistik Kantor
- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan-peraturan
- Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Tersedianya Jasa Surat Menyurat
- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan dan Jasa Kebersihan Kantor
- Tersedianya Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3. Sasaran 3 “Peningkatan Program Informasi dan Komunikasi Publik”

Keberhasilan sasaran, target dan realisasinya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Layanan Informasi, Telekomunikasi dan Opini Publik	4 Media	4 Media	88,95%
2.	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyiaran	500 Berita dan 4 Lembaga	500 Berita dan 4 Lembaga	94,82%
3.	Ketersediaan Informasi dan meningkatnya layanan informasi public	1 DIP	1 DIP	97,64%
4.	Terseleenggaranya Layanan Hubungan Media	1 TV Nasional, 3 Media TV, 15 Media Harian, 20 Media Mingguan dan 80 Media Online	1 TV Nasional, 3 Media TV, 15 Media Harian, 20 Media Mingguan dan 80 Media Online	99,96%
5.	Terwujudnya Fasilitasi Kemitraan Layanan Komunikasi Publik Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kab. Tanjab Barat	500 Berita	500 Berita	99,96%
6.	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	3 KIM	3 KIM	92,90%

Dari pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap indikator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata pencapaian hamper 100%. Capaian tersebut direalisasikan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- 2) Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- 3) Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
- 4) Kegiatan Layanan Hubungan Media
- 5) Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
- 6) Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Kegiatan tersebut diperoleh hasil (*outcame*) sebagai berikut:

- Tersedianya Layanan Informasi, Telekomunikasi dan Opini Publik
- Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyiaran
- Ketersediaan Informasi dan meningkatnya layanan informasi publik
- Terselenggaranya Layanan Hubungan Media
- Terwujudnya Fasilitasi Kemitraan Layanan Komunikasi Publik Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kab. Tanjab Barat
- Tersedianya Layanan Informasi, Telekomunikasi dan Opini Publik Sarana dan Prasarana Pendukung Lainnya.

4. Sasaran 4 “Peningkatan Program Aplikasi Informatika”

Keberhasilan sasaran, target dan realisasinya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya jumlah OPD yang menggunakan jaringan komunikasi data dan share bandwidth	44 OPD dan 126 Menara	44 OPD dan 126 Menara	99,98%
2.	Tersedianya dukungan layanan penggunaan Aplikasi Sistem Pemerintahan Informasi Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanjab Barat	12 Aplikasi	12 Aplikasi	99,98%
3.	Tersedianya jumlah sub domain Layanan Informasi Portal Induk Pemerintah Kab. Tanjab Barat	44 OPD	44 OPD	99,88%
4.	Tersedianya Portal Perangkat Daerah yang handal dan mutakhir	44 OPD	44 OPD	99,88%

Dari pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa dari setiap indikator sasaran dicapai dengan baik dengan rata-rata pencapaian hamper 100%. Capaian tersebut direalisasikan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahah Daerah.
- 2) Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- 3) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.
- 4) Kegiatan Pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO).

Pelaksanaan Kegiatan tersebut dapat diperoleh hasil (*outcome*) sebagai berikut:

- Tercapainya jumlah OPD yang menggunakan jaringan komunikasi data dan share bandwidth.
- Tersedianya dukungan layanan penggunaan Aplikasi Sistem Pemerintahan Informasi Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanjab Barat.
- Tersedianya jumlah sub domain Layanan Informasi Portal Induk Pemerintah Kab. Tanjab Barat.
- Tersedianya Portal Perangkat Daerah yang handal dan mutakhir.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat beserta target dan capaian realisasinya. Capaian kinerja (*performance results*) untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja utama (IKU) tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Per Indikator Utama (IKU) Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian s/d Tahun 2023	Tahun 2023			Target sasaran/ program/ kegiatan tahun 2023	Target Akhir Renstra s/d Tahun 2026	Capaian s/d 2022 terhadap capaian target Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan	Tersedianya Layanan Informasi, Telekomunikasi dan Opini Publik	4 Media	4 Media	4 Media	88,95%	4 Media	4 Media	

	Komunikasi Publik (IKP)	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyiaran	500 Berita dan 4 Lembaga	500 Berita dan 4 Lembaga	500 Berita dan 4 Lembaga	94,82%	500 Berita dan 4 Lembaga	500 Berita dan 4 Lembaga	
		Ketersediaan Informasi dan meningkatnya layanan informasi public	1 DIP	1 DIP	1 DIP	97,64%	1 DIP	1 DIP	
		Terseleenggaranya Layanan Hubungan Media	1 TV Nasional, 3 Media TV, 15 Media Harian, 20 Media Mingguan dan 80 Media Online	1 TV Nasional, 3 Media TV, 15 Media Harian, 20 Media Mingguan dan 80 Media Online	1 TV Nasional, 3 Media TV, 15 Media Harian, 20 Media Mingguan dan 80 Media Online	99,96%	1 TV Nasional, 3 Media TV, 15 Media Harian, 20 Media Mingguan dan 80 Media Online	1 TV Nasional, 3 Media TV, 15 Media Harian, 20 Media Mingguan dan 80 Media Online	
		Terwujudnya Fasilitasi Kemitraan Layanan Komunikasi Publik Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kab. Tanjab Barat	500 Berita	500 Berita	500 Berita	99,96%	500 Berita	500 Berita	
		Tersedianya Layanan Informasi, Telekomunikasi dan Opini Publik	3 Unit Sarana dan 4 Media	3 Unit Sarana dan 4 Media	3 Unit Sarana dan 4 Media	92,90%	3 Unit Sarana dan 4 Media	3 Unit Sarana dan 4 Media	
2.	Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital	Tercapainya jumlah OPD yang menggunakan jaringan komunikasi data dan <i>share bandwidth</i>	44 OPD dan 126 Menara	44 OPD dan 126 Menara	44 OPD dan 126 Menara	99,98%	44 OPD dan 126 Menara	44 OPD dan 126 Menara	
		Tersedianya dukungan layanan penggunaan Aplikasi Sistem Pemerintahan Informasi Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanjab Barat	12 Aplikasi	12 Aplikasi	12 Aplikasi	99,98%	12 Aplikasi	12 Aplikasi	

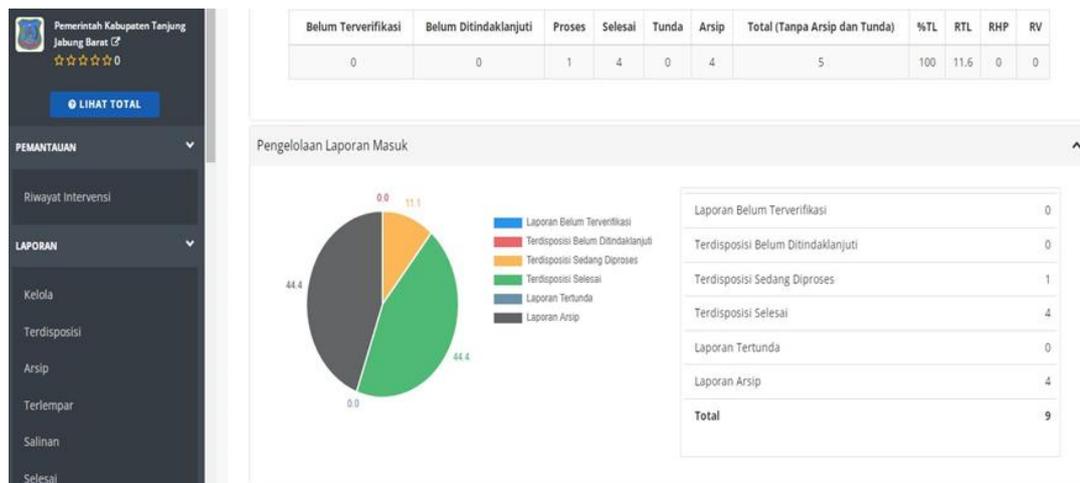
		Tersedianya jumlah sub domain Layanan Informasi Portal Induk Pemerintah Kab. Tanjab Barat	44 OPD	44 OPD	44 OPD	99,88%	44 OPD	44 OPD	
		Tersedianya Portal Perangkat Daerah yang handal dan mutakhir	44 OPD	44 OPD	44 OPD	99,88%	44 OPD	44 OPD	
3.	Meningkatnya OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menyampaikan data melalui aplikasi Satu Data	44 OPD	44 OPD	44 OPD	99,37%	44 OPD	44 OPD	
4.	Meningkatnya pengamanan sistem elektronik & informasi	Tercapainya jumlah surat email sanapati	50 %	50 %	50 %	99,47%	50 %	50 %	

Dari tabel III.2 tergambar bahwa ada 12 (Dua belas) indikator yang terbagi ke dalam 4 (Empat) sasaran strategis. Pada tahun 2023, sasaran strategis pertama adalah Meningkatkan Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) yang terdiri dari 6 Indikator sebagai berikut:

1. Indikator Tersedianya Layanan Informasi, melalui Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik. Kegiatan ini menekankan pada penyelenggaraan aplikasi LAPOR-SP4N dengan target 100% dan sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 45.875.000 atau 92,22%.

Dinas Komunikasi dan Informatika selaku *leading sector* dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik melalui Aplikasi LAPOR (*lapor.go.id*) telah melaksanakan Sosialisasi SP4N-LAPOR! Kepada Pejabat Penghubung yaitu Sekretaris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2023 bertempat di Aula Hotel Ar-Riyadh Kuala Tungkal. Narasumber pada kegiatan tersebut merupakan pejabat-pejabat yang berkompeten dibidangnya, dari Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Dinas Kominfo Provinsi Jambi.

Selama tahun 2023, LAPOR! Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menerima pengaduan sebanyak 9 (sembilan) laporan. 4 pengaduan telah ditindaklanjuti dan selesai, 1 pengaduan telah ditindaklanjuti dalam tahap proses sanggahan dari pelapor dan 4 laporan diarsipkan/dikembalikan kepada pelapor karena laporan bersifat umum dan kurang bukti dukung. Berikut tampilan statistik pengaduan yang masuk pada aplikasi LAPOR tahun 2023:



- Indikator Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyiaran, melalui Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik. Penyebarluasan informasi dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui media

penyiaran, pada Tahun 2023 target kinerja adalah 500 Berita dan 4 (Empat) Lembaga, kegiatan ini merupakan kegiatan rutinitas dari pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan penyiaran melalui RSPD, untuk menyebarkan informasi dan komunikasi terkait dengan pembangunan daerah, target pada akhir tahun 2023 dengan capaian persentase 95,94%

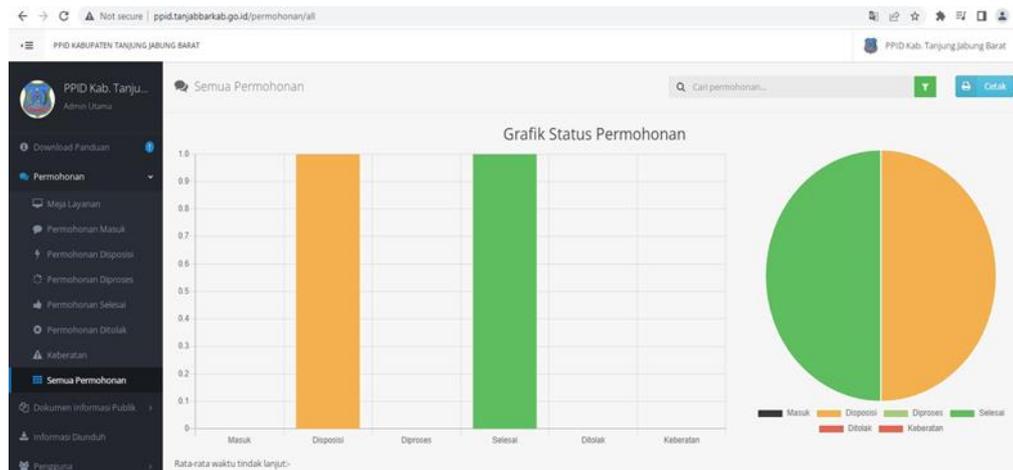
Pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 4 Lembaga, sebagai berikut:

- a. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal;
- b. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) KIN Radio di Kuala Tungkal;
- c. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Cahaya Untuk Kito (CUK) FM di KecamatanTebing Tinggi;
- d. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) TV Pengabuan di Kuala Tungkal

Ruang lingkup Kegiatan Operasional Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencakup kegiatan Koordinasi dan Konsultasi, Penyebaran informasi pada studio siaran dengan Beberapa tenaga Penyiar dalam bentuk Temu Wicara, Dialog /Thakshow, Berita Daerah dan juga Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Indikator Ketersediaan Informasi dan meningkatnya layanan informasi publik, melalui Kegiatan Pelayanan Informasi Publik. Dengan terbitnya Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan informasi kepada publik dan pengaduan serta penyelesaian sengketa informasi publik dengan target 1 DIP yang mana pada akhir Tahun 2023 dengan realisasi capaian 98,63%. Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik. Pada Tahun 2023, PPID Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menerima permohonan informasi publik. Penjelasan terkait dengan

permohonan dan layanan informasi publik, dapat dijelaskan pada bagian di bawah ini:



4. Indikator Terselenggaranya Layanan Hubungan Media, melalui Kegiatan Layanan Hubungan Media. pada Tahun 2023 telah ditargetkan 1 (Satu) TV Nasional, 3 (Tiga) Media TV, 15 Media Harian, 20 Media Mingguan dan 80 Media Online dan sampai dengan triwulan akhir Tahun 2023 telah tercapai sesuai dengan target atau 99,96%.
5. Indikator Terwujudnya Fasilitas Kemitraan Layanan Komunikasi Publik Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kab. Tanjab Barat, melalui Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan. Dalam rangka pengelolaan komunikasi dan informasi publik untuk Tahun 2023 Dinas Kominfo telah menargetkan 500 Berita dan sampai dengan akhir triwulan IV telah tercapai sesuai dengan target dengan realisasi capaian 99,96%.
6. Indikator terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat, target kinerja Tahun 2023 sebanyak 3 (Tiga) KIM sampai dengan akhir triwulan IV telah tercapai sesuai dengan target dengan realisasi capaian 92,90%.
Sosialisasi dan Pembinaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 bertempat di Hotel Ar-Riyadh Kuala Tungkal, sebagai berikut:
 - a. Peserta sosialisasi berjumlah 46 orang yang terdiri dari:
 - KIM Campur Sari dari Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir yang mengirimkan anggotanya sebanyak 10 orang;

- KIM Masa Bakti dari Kelurahan Betara Kiri, Kecamatan Bram Itam yang mengirimkan anggotanya sebanyak 7 orang;
 - KIM Landak Berduri dari Kecamatan Senyerang yang mengirimkan anggotanya sebanyak 8 orang;
 - KIM Mandraguna dari Kecamatan Bram Itam yang mengirimkan anggotanya sebanyak 8 orang;
 - KIM Bumi Berkah dari Desa Bram Itam Raya, Kecamatan Bram Itam yang mengirimkan anggotanya sebanyak 6 orang;
 - Peserta dari Dinas Kominfo Kab. Tanjung Jabung Barat sebanyak 7 orang.
- b. Narasumber merupakan pejabat-pejabat yang berkompeten dibidangnya, seperti Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabid Layanan E-Government Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kasi Kemitraan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Provinsi Jambi.

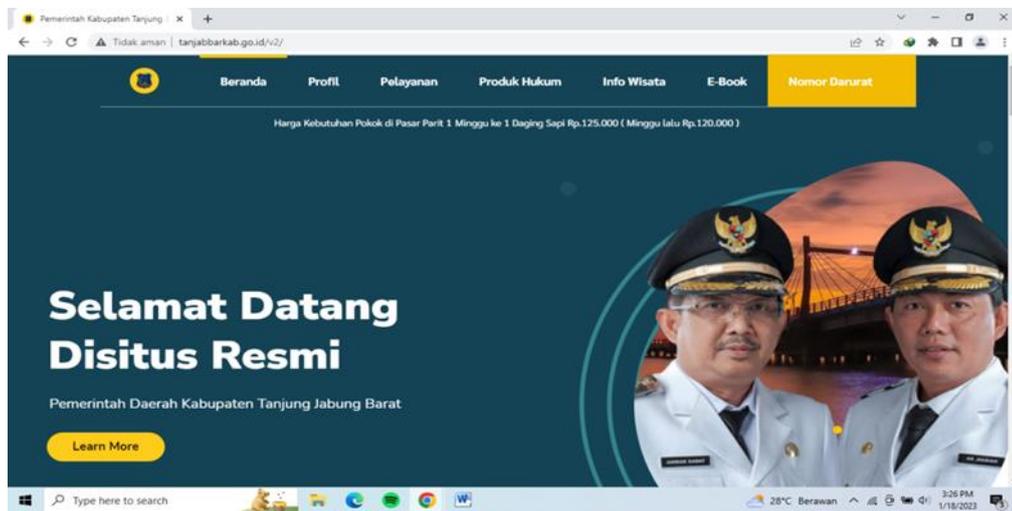




Sasaran Strategis Kedua adalah Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital di Lingkungan Pemkab Tanjab Barat terdiri dari 4 (Empat) indikator yaitu:

1. Indikator Tercapainya jumlah OPD yang menggunakan jaringan komunikasi data dan *share bandwidth* target kinerja Indikator ini pada Tahun 2023 dengan kapasitas 600 mbps sebanyak 44 (Empat puluh empat) OPD dan Pengawasan dan memfalisasi, sebanyak 126 menara telekomunikasi dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah tercapai target 126 Menara. Dengan pencapaian telah terlaksana sampai dengan triwulan akhir target retribusi menara pada Tahun 2023 ditargetkan Rp. 410.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 407.778.000,00 atau dengan persentase capaian 99,46%. pada Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.671.344.000,00 dengan realisasi sampai dengan triwulan IV Rp. 1.671.052.500,00 atau capaian 99,98%.
2. Indikator Tersedianya dukungan layanan penggunaan Aplikasi Sistem Pemerintahan Informasi Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanjab Barat, target kinerja Indikator ini pada Tahun 2023 sebanyak 12 (Dua belas) Aplikasi pada Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 118.220.000,00 dengan realiasi capaian 99,94%.
3. Tersedianya jumlah sub domain Layanan Informasi Portal Induk Pemerintah Kab. Tanjab Barat, target kinerja Indikator ini pada Tahun 2023 sebanyak 44 (Empat

puluh empat) OPD termasuk 13 (Tiga belas) Kecamatan. Web Site sebagai media informasi dan promosi daerah dan situs resmi Pemerintah Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat, memegang peranan penting dalam penyampaian informasi dan promosi pembangunan daerah Kab. Tanjung Jabung Barat kepada masyarakat dengan alamat <http://tanjabkab.go.id> yang *up to date* yang merupakan peran Dinas Kominfo untuk selalu menyediakan informasi dalam penyebarluasan informasi yang telah menjadi kebutuhan pokok dalam pelayanan public. Website OPD sebanyak 31 OPD dan Kecamatan berjumlah 13 Kecamatan pada Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Program Aplikasi Informatika dengan anggaran sebesar Rp. 77.899.800,00 dengan realisasi capaian 99,88%.



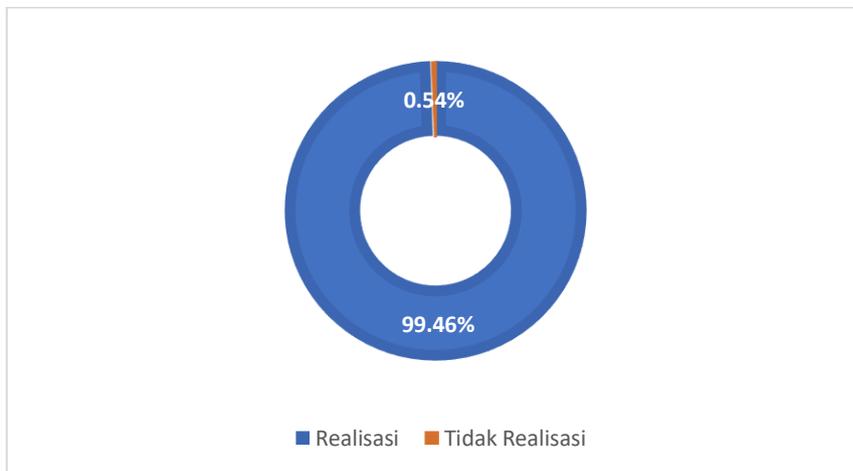
4. Tersedianya Portal Perangkat Daerah yang handal dan mutakhir, target kinerja Indikator ini pada Tahun 2023 sebanyak 44 (Empat puluh empat) OPD pada Kegiatan Pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO) dengan Program Aplikasi Informatika dengan anggaran sebesar Rp. 40.800.000,- realisasi Rp. 48.199.800,00 atau 99,88%.

3.3. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 407.778.000,00 atau 99,46% dari target Rp. 410.000.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 secara persentase realisasi menunjukkan penurunan sejumlah 0,54% dari realisasi 100%

di tahun 2022. Namun secara nominal mengalami kenaikan sejumlah Rp. 6.468.000,00 karena di tahun 2022 target hanya Rp. 400.000.000,00.

Gambar 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan (PAD) Tahun 2023

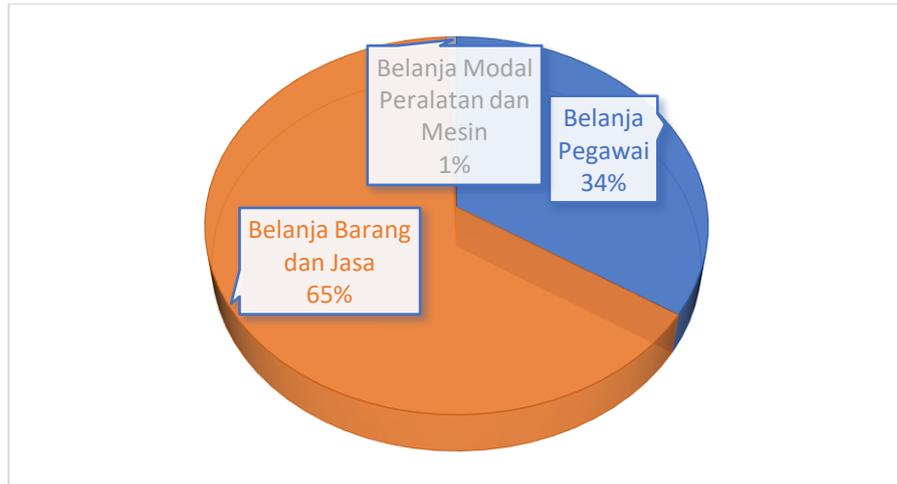


Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Perbup Nomor: 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 9.850.902.556,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi sebesar Rp. 9.780.209.556,00 atau 99,28% terdiri dari:
 - Belanja Pegawai Rp. 3.366.334.856,00 / (34,42%)
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.413.874.700,00 / (65,58%)
- 2) Belanja Modal sebesar Rp. 70.693.000,00 atau 0,72%, berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Berdasarkan rincian pagu anggaran di atas dapat digambarkan pada komposisi berikut:

Gambar 3.2
Komposisi Pagu Anggaran Dinas Kominfo Tahun 2023

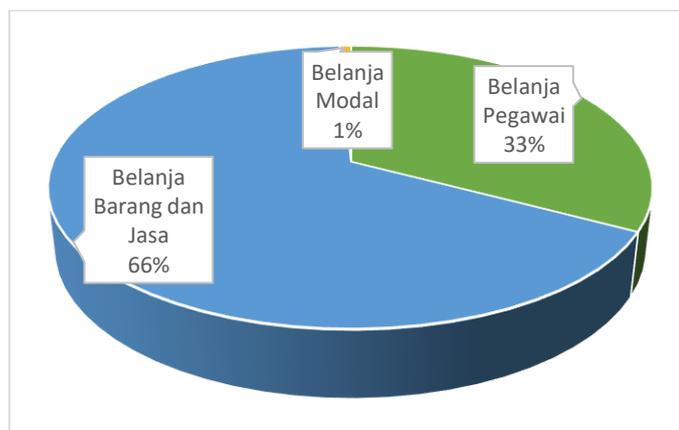


Dari pelaksanaan 5 program dengan 12 kegiatan yang dilaksanakan maka realisasi serapan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 sebesar Rp. 9.613.038.304,00 atau 97,59% dengan komposisi:

- 1) Belanja Operasi sebesar Rp. 9.613.038.304,00 atau 97,59% terdiri dari:
 - Belanja Pegawai Rp. 3.151.186.748,00 / (93,61%)
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.391.201.556,00 / (99,65%)
- 2) Belanja Modal sebesar Rp. 70.650.000,00 atau 99,94%, berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

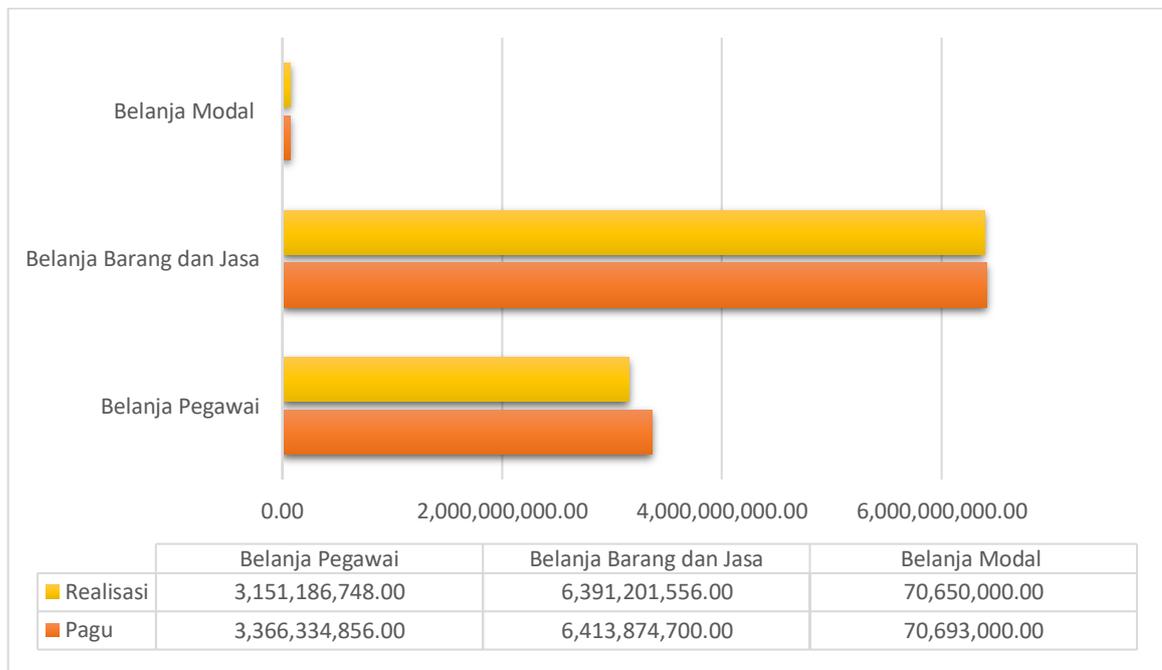
Berdasarkan rincian realisasi anggaran diatas dapat digambarkan pada komposisi berikut:

Gambar 3.3
Komposisi Serapan Anggaran Dinas Kominfo Tahun 2023



Perbandingan antara komposisi pagu anggaran dan serapan anggaran Dinas Kominfo dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3.4
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran
Dinas Kominfo Tahun 2023



Dalam penyelenggaraan kegiatan selama tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih dihadapkan kepada berbagai hambatan dan kendala, yang antara lain:

1. Beberapa pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan mengalami keterlambatan pada tahap awal pelaksanaan sehingga berdampak pada *schedule* tahapan pelaksanaan selanjutnya.
2. Perlunya peningkatan fungsi pengawasan oleh PPK dan PPTK agar pelaksanaan subkegiatan tetap *on schedule* dan capaian pelaksanaan sub kegiatan dapat dimaksimalkan.
3. Perlunya percepatan administrasi penunjang pencairan anggaran agar proses pelaksanaan sub kegiatan dapat tetap berjalan normal.
4. Masih terbatasnya PNS untuk beberapa jabatan struktural eselon IV dan pejabat fungsional seperti Analis Keuangan, Pranata Komputer dan Pranata Hubungan Masyarakat.

5. Masih kurangnya kesadaran dari OPD di lingkup Pemkab Tanjung Jabung Barat untuk *update portal* OPD yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk mensiasati permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat memerlukan solusi-solusi sehingga permasalahan tersebut dapat ditemukan jalan keluarnya. Solusi yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat tahap awal pelaksanaan program, kegiatan, sub sehingga terlaksana tepat waktu.
2. Meningkatkan fungsi pengawasan oleh PPK dan PPTK agar pelaksanaan subkegiatan *on schedule* dan capaian pelaksanaan sub kegiatan dapat dimaksimalkan.
3. Mempercepat administrasi penunjang pencairan anggaran agar proses pelaksanaan sub kegiatan dapat tetap berjalan normal.
4. Melaporkan secara terus-menerus kepada BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang masih banyaknya kekurangan PNS untuk beberapa jabatan struktural eselon IV dan pejabat fungsional seperti Analis Keuangan, Pranata Komputer dan Pranata Hubungan Masyarakat di Dinas Kominfo.
5. Mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan kepada admin portal OPD di lingkup Pemkab Tanjung Jabung Barat untuk rajin *update portal* OPD yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi (LKj) disusun dalam rangka pertanggungjawaban Anggaran, Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada Dinas Kominfo. Laporan ini juga sebagai pedoman alat kendali, penilaian kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Hasil penilain kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat. Adapun Misi yang didukung oleh dinas Kominfo Kab. Tanjung Jabung barat yaitu MISI III. Ukuran dimaksud meliputi: Capaian Kinerja, analisis capaian kinerja dan analisis akuntabilitas keuangan. Tahun 2023 Disparpora Kab. Tanjung Jabung Barat melaksanakan 5 Program dengan 12 Kegiatan.

Rata-rata capaian kinerja Dinas Kominfo tahun 2023 berdasarkan Evaluasi Hasil Terhadap RENJA sebesar 97,59% dengan predikat “**Sangat Tinggi**” sedangkan rata-rata capaian kinerja pada tahun ketiga berdasarkan Evaluasi Hasil Terhadap RENSTRA periode 2021 – 2026 sebesar 44,03% dengan predikat dengan predikat “Sangat Rendah”.

Adapun realisasi berdasarkan pagu anggaran tahun 2021 yaitu :

1) Belanja Operasi

- Belanja Pegawai dengan pagu anggaran Rp. 3.366.334.856,00 terealisasi Rp. 3.151.186.748,00
- Belanja Barang dan Jasa dengan pagu anggaran Rp. 6.413.874.700,00 terealisasi Rp. 6.391.201.55600

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan pagu anggaran Rp. 70.693.000,00 terealisasi Rp. 70.650.000,00

Dari jumlah anggaran tersebut pencapaian kinerja perprogram rata-rata 98,71% dan pencapaian realisasi anggaran pun menunjukkan angka rata-rata di atas 97,59%.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program kerja selama tahun 2023 Dinas Kominfo Kab. Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan program dan kegiatan dengan berpedoman pada target capaian yang tercantum dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) tahun 2023. Dalam pelaksanaan kegiatan tentu ada permasalahan yang dihadapi namun dapat diatasi dengan mengupayakan pemecahan masalah agar dapat meminimalisir resiko terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan selanjutnya dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran untuk peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Untuk mencapai optimalisasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Kab. Tanjung Jabung Barat yang direalisasikan melalui beberapa program dan kegiatan, perlu adanya kesinambungan kegiatan dengan dukungan dana yang memadai dan fasilitas atau sarana prasarana penunjang lainnya. Oleh karena itu program dan kegiatan yang memerlukan adanya suatu kesinambungan akan terus diusulkan sebagai program dan kegiatan di masa yang akan datang yang mengaju pada pemutakhiran Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kominfo Kab. Tanjung Jabung Barat yang disusun secara objektif dengan mengacu kepada nilai-nilai transparansi dan akuntabel. Menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dimasa yang akan datang, saran koreksi dan masukan positif kami butuhkan guna penyempurnaan laporan ini tetap diperlukan.

Kuala Tungkal, 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



JOAN PRAYUDA, SE., MM

Pembina

NIP. 19810829 201001 1 001